



**LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN**



TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Tahunan Tahun 2025 Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan segala upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam periode mendatang. Dengan disusunnya Laporan Tahunan Tahun 2025 Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program / kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat, sebagai perwujudan peran dan layanan yang berfokus sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*.

Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari seluruh jajaran Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan dan mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2025, serta kegiatan dukungan teknis dan administrasi dari kesekretariatan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami berharap adanya masukan dan dukungan demi kemajuan Inspektorat dalam mengawal Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 2 Januari 2026
Inspektur



Dr. R. Natanegara Kartika Purnama, S.E., M.Si
NIP 197309081999031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Pendahuluan	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup.....	2
4. Dasar Hukum.....	2
B. Sumber Daya	3
1. Sumber Daya Manusia	3
2. Sumber Daya Anggaran	4
C. Capaian Kegiatan	4
1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat.....	4
2. Capaian Pengawasan.....	6
3. Data Monitoring Temuan APIP	6
4. Data Monitoring Temuan Eksternal	7
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya	7
D. Penutup.....	7
a. Kesimpulan	7
b. Kendala	9
c. Saran	9
E. Lampiran.....	10

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PADA INSPEKTORAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai salah satu Unit Eselon II pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Melalui kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan integritas pegawai, sehingga diharapkan dapat membangkitkan motivasi pegawai untuk meningkatkan integritas pelayanan guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan agar kualitas aparatur sesuai dengan era tuntutan sekarang ini. Diharapkan melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi Kementerian Hukum yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, keamanan 1embi negara, serta operasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian Kompilasi kegiatan yang dilakukan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Laporan Tahunan bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, dan ***“think out of the box”***. Laporan Tahunan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada setiap bulan laporan, juga berisikan analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut, laporan Tahunan juga berisikan penjelasan atas masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut. Laporan Tahunan juga dapat menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki atau diterima oleh unit kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di awal Tahun 2025, Inspektorat

telah menetapkan kegiatan pengawasan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dilaksanakan/dicapai. Dengan dukungan sumber daya yang tersedia telah merealisasikan program/kegiatan sebagaimana ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2025 diharapkan dapat mendeskripsikan capaian kinerja dan hambatan/kendala dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, serta kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kinerja.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun untuk menyampaikan informasi kegiatan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya selama Tahun 2025.

b. Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang capaian kinerja kepada pimpinan, sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi yang dalam laporan ini adalah terbatas pada pencapaian kinerja pada Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

4. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- f) Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- g) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2025;

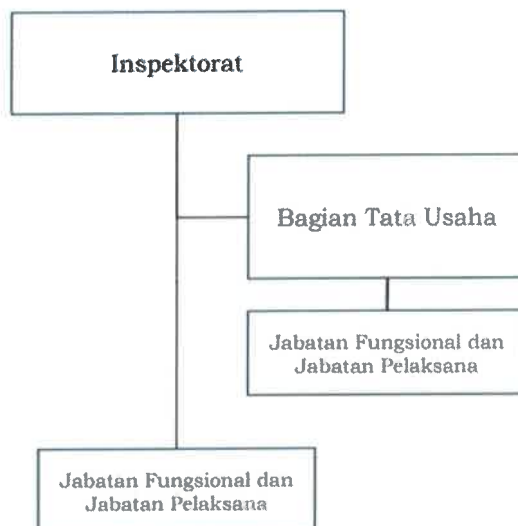
B. SUMBER DAYA

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan pada Pasal 97 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Deputi Koordinasi Bidang Hukum, Deputi Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia, Deputi Koordinasi Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Inspektorat;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- g. Pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan Inspektorat;

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Inspektorat memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



- a. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 - 1) Auditor Madya : 2 orang
 - 2) Auditor Muda : 1 orang
 - 3) Pelaksana/JFT : 8 orang
- b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha : 1 orang

2. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan Petikan DIPA Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-130.01.1.693734/2025 tanggal 14 April 2025, Inspektorat memiliki anggaran sebesar Rp389.709.000.00. Sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor: S-168/AG/AG.5/2025 Tanggal 14 April 2025 Hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan TA.2025 terkait ABT Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Pagu Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp399.389.000.00 – Rp346.493.242 (realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2025) menjadi Rp39.709.759 (sisa) atau sebesar 90,06%, dengan rincian:

- a. Realisasi bulan Januari 2025 sebesar Rp0;
- b. Realisasi bulan Februari 2025 sebesar Rp0;
- c. Realisasi bulan Maret 2025 sebesar Rp0;
- d. Realisasi bulan April 2025 sebesar Rp0;
- e. Realisasi bulan Mei 2025 sebesar Rp24.296.000,-
- f. Realisasi bulan Juni 2025 sebesar Rp100.634.000,-
- g. Realisasi bulan Juli 2025 sebesar Rp131.251,-
- h. Realisasi bulan Agustus 2025 sebesar Rp97.246.000,-
- i. Realisasi bulan September 2025 sebesar Rp3.497.000,-
- j. Realisasi bulan Oktober 2025 sebesar Rp 0.
- k. Realisasi bulan November 2025 sebesar Rp19.518.600,-
- l. Realisasi bulan Desember 2025 sebesar Rp114.356.391,-

C. CAPAIAN KEGIATAN

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Inspektur, telah disepakati dan ditetapkan Sasaran Kinerja “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan”. Sasaran Kinerja tersebut terdiri dari 4 (empat) Indikator Sasaran Kinerja, yang kemudian diturunkan secara berjenjang / *cascading* menjadi sasaran kinerja pegawai Inspektorat, guna lebih mengukur dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pendukung ketercapaian sasaran kinerja program.

Adapun 4 (empat) Indikator Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud, belum seluruhnya tercapai 100%, yang disebabkan realisasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sangat bergantung pada pelaksanaan kegiatan yang diampu oleh Inspektorat, maupun pelaksanaan pada mitra kerja. Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh belum ditetapkannya Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 beserta Manual Indikator Utama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Sehingga tata cara penghitungan capaian realisasi kinerja masih mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor: M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025, Capaian Kinerja Inspektorat dapat dirinci sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Analisis	Kendala / Hambatan
1. Persentase Tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP	90%	0%	Belum dapat dilakukan penghitungan atas tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal	1. Rencana Strategis masih dalam tahap penyusunan; 2. Perjanjian Kinerja yang sudah dibuat masih perjanjian kinerja

internal Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai kewenangan			Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai kewenangan Inspektorat. Namun sampai dengan Bulan Februari 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen yang memberikan kontribusi positif atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan evaluasi AKIP Tahun 2024. Adapun kegiatan tersebut diantaranya: 1. Telah dibuat SK PIC pengawasan Inspektorat; 2. Telah dibuat Reviu ABT	sementara yang akan disesuaikan dengan Renstra; 3. Anggaran yang tersedia belum memadai 4. Belum disusun rencana aksi atas hasil evaluasi AKIP internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan. 5. Belum disusun rencana aksi atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6. Kondisi transisi Kementerian yang berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi mitra kerja sebagaimana Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang berlaku.
2. Persentase Tindak lanjut pelaksanaan	90%	0%	Belum dapat dilakukan penghitungan atas capaian tindak lanjut	1. Belum disusun rencana aksi atas hasil evaluasi SPIP oleh

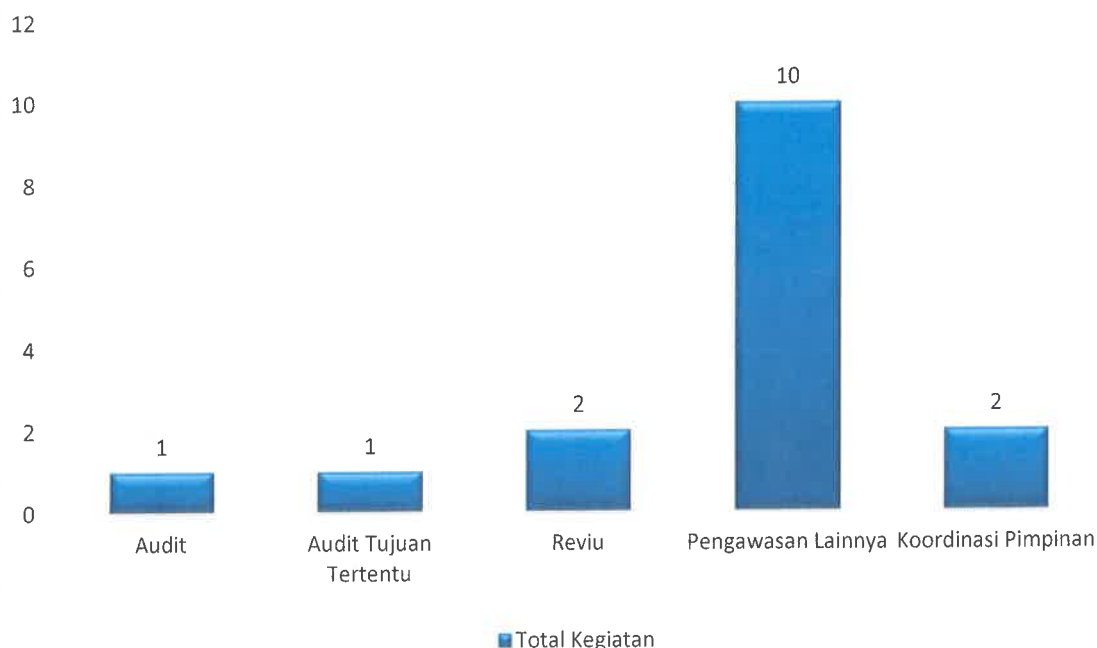
rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses			Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat. Namun sampai dengan Bulan Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen yang memberikan kontribusi positif atas Peningkatan Maturitas SPIP terkait Komponen Struktur dan Proses, yakni: 1. Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan ABT, Keuangan serta BMN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi dan Pemasarakatan Semester II Tahun 2024. 2. Pendampingan Penyusunan LKJIP Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025. 3. Reviu LKJIP Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak	BPKP Tahun 2025 di lingkungan Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi dan Pemasarakatan. 2. Kondisi transisi Kementerian yang berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi mitra kerja sebagaimana Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang berlaku. 3. Belum terdapat internalisasi pelaksanaan Rencana Aksi SPIP beserta Evaluasi SPIP dari Inspektorat selaku pengampu kegiatan.
--	--	--	--	--

				Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2024.	
3. Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko	90%	0%	Belum dapat dilakukan penghitungan atas capaian tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat. Namun selama Bulan Februari 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen yang memberikan kontribusi positif atas Peningkatan Maturitas SPIP terkait Manajemen Risiko diantaranya: 1. Pelaksanaan Reviu Tender Dini Pra-DIPA. 2. Pelaksanaan revisi penyesuaian anggaran atas kebijakan efisiensi.	Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2024.	1. Belum disusun rencana aksi atas hasil evaluasi SPIP oleh BPKP Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. 2. Kondisi transisi Kementerian yang berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi mitra kerja sebagaimana Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang berlaku.
4. Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP	90%	0%	Belum dapat dilakukan penghitungan atas capaian tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait	Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2024.	1. Belum disusun rencana aksi atas hasil evaluasi SPIP oleh BPKP Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum,

terkait efektivitas pengendalian korupsi			Manajemen Risiko di Inspektorat. Namun sampai dengan Bulan Februari 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen yang memberikan kontribusi positif atas Peningkatan Maturitas SPIP terkait Pengendalian Korupsi.	Hak Asasi, Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan 2. Kondisi transisi Kementerian yang berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi mitra kerja sebagaimana Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang berlaku. 3. Belum terdapat internalisasi pelaksanaan Rencana Aksi SPIP beserta Evaluasi SPIP dari Inspektorat selaku pengampu kegiatan.
--	--	--	---	--

2. Capaian Pengawasan

Data Pengawasan Inspektorat yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



3. Data Monitoring Temuan Eksternal

Berdasarkan Petunjuk Penertiban dan Perbaikan yang telah diterbitkan oleh Inspektur atas hasil pengawasan Inspektorat, diketahui terdapat temuan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Juktib	Satuan Kerja (Kedeputan)	Jumlah Temuan	Sudah Tindaklanjuti	Sisa Temuan
1.					
2.					

Adapun saldo temuan pada mitra kerja di lingkungan Inspektorat, sebelum terdapat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan masih dalam proses kompilasi dan koordinasi dengan pemegang data pada Inspektorat.

4. Data Monitoring Temuan Internal

No	Objek Pemeriksaan	Tahun LHP	Rekomendasi		Reviu BPK		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	Audit Kinerja Deputy Imipis	2025	1	2.175.000		-		-
2	Deputi Hukum	2025	1	104.550		-		-
Jumlah			2	2.279.550				

Adapun saldo temuan pada mitra kerja di lingkungan Inspektorat sebelum terdapat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, masih dalam proses kompilasi dan koordinasi dengan pemegang data pada Inspektorat.

5. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya

Data Capaian Program Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Total Kegiatan
1	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	1
2	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	0
3	Pelaksanaan Pengawasan Internal	1
4	Pelaksanaan Pelayanan Manajemen Pengawasan	0

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Inspektorat pada Tahun 2025 telah melaksanakan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reviu ABT sebanyak 1 (satu) kegiatan;
- 2) Rapat penyusunan rencana kerja Inspektorat 1 (satu) kegiatan;
- 3) Rapat Koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inpektorat Tahun 2025 1 (satu) kegiatan;
- 4) Rapat Penyusunan PKPT Inpektorat Tahun 2025 1 (satu) kegiatan;
- 5) Audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 (satu) kegiatan;
- 6) Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Survei

- Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 1 (satu) kegiatan;
- 7) Sosialisasi Penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Penyusunan Pedoman Pengawasan dan *Standart Operating Procedure* (SOP) 1 (satu) kegiatan
 - 8) Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 1 (satu) kegiatan;
 - 9) Penyusunan Pedoman Pengawasan dan *Standart Operating Procedure* (SOP) 1 (satu) kegiatan
 - 10) Kegiatan Evaluasi dan Tindak lanjut Hasil pelaksanaan Audit Kinerja Semester I T.A. 2025;
 - 11) Rapat Perencanaan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi 1 (satu) kegiatan;
 - 12) Rapat Persiapan Audit Kelembagaan 1 (satu) kegiatan;
 - 13) Audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Audit dan Evaluasi Kelembagaan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 14) Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan;
 - 15) Rapat hasil Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan;
 - 16) Mengikuti Rangkaian Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025;
 - 17) Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Konflik Kepentingan.
- b. Pada Tahun Anggaran 2025 Pagu Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp399.389.000.00 – Rp346.493.242 (realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2025) menjadi Rp39.709.759 (sisa) atau sebesar 90,06%, dengan rincian
- 1) Realisasi bulan Januari 2025 sebesar Rp 0.
 - 2) Realisasi bulan Februari 2025 sebesar Rp 0.
 - 3) Realisasi bulan Maret 2025 sebesar Rp 0.
 - 4) Realisasi bulan April 2025 sebesar Rp 0.
 - 5) Realisasi bulan Mei 2025 sebesar Rp24.296.000,-
 - 6) Realisasi bulan Juni 2025 sebesar Rp100.634.000,-
 - 7) Realisasi bulan Juli 2025 sebesar Rp131.251,-
 - 8) Realisasi bulan Agustus 2025 sebesar Rp97.246.000,-

- 9) Realisasi bulan September 2025 sebesar Rp3.497.000,-
- 10) Realisasi bulan Oktober 2025 sebesar Rp 0.
- 11) Realisasi bulan November 2025 sebesar Rp19.518.600,-
- 12) Realisasi bulan Desember 2025 sebesar Rp114.356.391,-

2. Kendala

- a. Kondisi transisi Kementerian yang berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi mitra kerja sebagaimana Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang berlaku.
- b. Kebijakan efisiensi yang mengharuskan adanya penyesuaian anggaran pada sejumlah kegiatan, dengan tetap mempertimbangkan pengawasan berbasis risiko.
- c. Belum terdapat internalisasi pelaksanaan Rencana Aksi AKIP dan RB untuk tahun 2025.

3. Saran

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, melalui koordinasi yang sinergis dengan Inspektorat Pengampu, Eselon I Pengampu dan Unit Kerja, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Agar diberikan penambahan jumlah Auditor guna mendukung tugas dan fungsi Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Demikian kami sampaikan bahwa Laporan Tahunan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan kegiatan dukungan manajemen Inspektorat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Laporan tahunan dilaksanakan dan dikompilasi untuk menjadi dasar dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Laporan Ikhtisar Pengawasan, Laporan Tahunan serta sebagai pertanggung jawaban kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Jakarta, 2 Januari 2026
Inspektur



Dr. R. Natanegara Kartika Purnama, S.E., M.Si
NIP 197309081999031001

LAMPIRAN I
Rincian Kegiatan Pengawasan Inspektorat
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Tmt dan Lokasi	No dan Tgl LHP
AUDIT			
1	Audit Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	14 s/d 31 Juli 2025	Kompilasi LHP pada Inspektorat
REVIU			
1	Reviu Anggran Belanja Tambahan (ABT) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	April 2025	Kompilasi LHP pada Inspektorat
2.	Reviu Draf Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029	Juni 2025	Kompilasi LHP pada Inspektorat
PENGAWASAN LAINNYA			
1	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat	2 Mei 2025 (Ruang Rapat Kedeputan Bid. Koord Imigrasi dan Pemasyarkatan)	Kompilasi LHP pada Inspektorat
2	Rapat Koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2025	8 Mei 2025 (Ruang Rapat Kedeputan Bid. Koord Imigrasi dan Pemasyarkatan)	Kompilasi LHP pada Inspektorat
3.	Rapat Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2025	15 Mei 2025 (Ruang Rapat Kedeputan Bid. Koord Hak Asasi Manusia)	Kompilasi LHP pada Inspektorat

4.	Audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	15 Mei 2025 (Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 33 Jl. Pramuka 13120 Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta)	Kompilasi LHP pada Inspektorat
5.	Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	16 Mei 2025 (Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1, 3, RT.3/RW.1 12940 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jawa)	Kompilasi LHP pada Inspektorat
6.	Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	28 Mei 2025 Hotel Mövenpick Hotel Jakarta City Centre, Pecenongan St No.7, RW.17, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120	Kompilasi LHP pada Inspektorat
7.	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	12 Juni 2025 Hotel Mercure Sabang, Jl. H. Agus Salim No.11, Gambir, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110	Kompilasi LHP pada Inspektorat
8.	Penyusunan Pedoman Pengawasan dan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	18 s/d 20 Juni 2025 Hotel The Grove Suites by GRAND ASTON, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12960	Kompilasi LHP pada Inspektorat

9.	Kegiatan Evaluasi dan Tindak lanjut Hasil pelaksanaan Audit Kinerja Semester I T.A. 2025	25 s.d 27 Agustus 2025 Hotel Mercure Tangerang BSD City, Cbd 55, Jl. Edutown Kavling Lot li No.8, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339	Kompilasi LHP pada Inspektorat
10.	Rapat Perencanaan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	17 September 2025 Ruang rapat Inspektorat Kemeneko Lt.15 Gedung Ex. Sentra Mulia	Kompilasi LHP pada Inspektorat
11.	Rapat Persiapan Audit Kelembagaan	16 Oktober 2025 Secara Daring Virtual Zoom	Kompilasi LHP pada Inspektorat
12.	Audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Audit dan Evaluasi Kelembagaan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	11 November 2025 Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 69, Senayan Jakarta Selatan	Kompilasi LHP pada Inspektorat
13.	Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	25 dan 26 November 2025 Hotel The Grove Suites by GRAND ASTON, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12960	Kompilasi LHP pada Inspektorat
14.	Rapat Hasil Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	28 Novemebr 2025 Ruang Rapat Staf Ahli/Khusus	Kompilasi LHP pada Inspektorat
15.	Mengikuti Rangkaian Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025	6 s/d 9 Desember 2025 Komplek Kepatihan Yogyakarta dan Area Museum Benteng	Kompilasi LHP pada Inspektorat

		Vredeburg, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	
16.	Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Konflik Kepentingan	11 Desember 2025 Ruang Majapahit, Gedung AA Maramis Lt.2, Jl. Lapangan Benteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat	Kompilasi LHP pada Inspektorat